

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kinerja Kepala Desa Sungai Musang Tahun 2021

Muhammad Fahmi¹, Syafril^{2*}, Mohdari³, Neti Rosiana Fadilah⁴, Yuliani⁵

^{1,2,4,5}ASMI Citra Nusantara Banjarmasin, Indonesia

³STIE Nasional Banjarmasin, Indonesia

Email: *²syafril99riau@gmail.com

Abstrak– Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahan desanya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan. Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sungai Musang antusiasme masyarakat sangat menunjang keberhasilan musyawarah desa tersebut. Dengan gaya kepemimpinan demokratis musyawarah desa dapat berjalan dengan baik dan tertib serta menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi pembangunan desa. Pelaksanaan musyawarah desa dilakukan dengan cara berdiskusi mencari solusi terhadap berbagai masalah yang ada di desa untuk dicarikan solusi yang komprehensif.

Kata Kunci: Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan, Desa, Partisipasi, Kepemimpinan

Abstract– The increased participation of village communities in the preparation of village development plans is one of the factors that becomes a benchmark for the extent to which the village develops the values of good village governance in the wheels of village governance. The involvement of rural communities in a broad sense must be encouraged both through regulations and the creation of an ideal democratizing climate in the village. Participation in the context of implementing the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang) is actually more understood as the contribution of the village community to improve the effectiveness and efficiency of development. In the implementation of the Sungai Musang Village Development Planning Deliberation, the enthusiasm of the community greatly supports the success of the village meeting. With a democratic leadership style, village deliberations can run well and orderly and produce decisions that are beneficial for village development. The implementation of village deliberations is carried out by discussing finding solutions to various problems that exist in the village to find a comprehensive solution.

Keywords: Village Deliberation, Development Planning, Village, Participation, Leadership

1. PENDAHULUAN

Musyawarah perencanaan pembangunan yang di singkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrenbangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrenbangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrenbangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik (Rumegang, 2021). Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Ketentuan Umum Pasal 1, menegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (Sulistiyono, 2019). Dalam menunjang pembangunan suatu daerah salah satu yang harus dicapai adalah visi misi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang terkandung dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN dimana masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup terendah yaitu kelurahan, desa ataupun kecamatan.

2. KERANGKA TEORI

Pembangunan desa tidak lepas dari kepemimpinan kepala desanya. Apalagi pengembangan desa saat ini menjadi prioritas pembangunan Indonesia yang dibuktikan dengan konsennya pemerintah pusat terhadap pengembangan desa yaitu adanya alokasi dana desa. Pemimpin atau kepala desa yang ditunjuk merupakan pelayan masyarakat, seorang pemimpin dituntut untuk memahami kehendak dan memperhatikan penderitaan maupun aspirasi rakyat. Kepala Desa harus benar-benar menjadi seorang pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan pemimpin sebagian kelompok, keluarga, keturunan, agama dan suku tertentu dan lain sebagainya. Pemimpin masyarakat artinya pemimpin yang dekat dengan masyarakat, melindungi, mengayomi dan sekaligus melayani masyarakatnya. Salah satu hal yang ditunjukkan kepala desa kepada masyarakatnya tidak hanya sikap bijaksana yang mengayomi masyarakatnya, namun juga memperhatikan sisi administrative. Seorang pemimpin yang berkualitas juga dapat dilihat dari sisi visionernya, terutama keterjelasan mengenai apa yang ingin dicapai serta cara pencapaiannya. Atau dalam kata lain rencana kerja dan pengevaluasian dari seorang kepala desa terukur jelas dalam masa jabatannya selama 5 tahun. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat kali ini ingin membantu kepala desa Sungai Musang yang baru terpilih dalam rangka menetapkan visi, misi dan strategi pencapaian kinerja kepala desa untuk masa jabatan 2021-2026 mendatang.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2001, h.49). Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Kepala desa sendiri di haruskan untuk memiliki sertifikat berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa tugas Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa:

- a. Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.
- b. Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.
- c. Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

White dan Lippit dalam Reksohadiprodjo (2001) mengemukakan tiga (3) gaya kepemimpinan yaitu :

A. Gaya Kepemimpinan Demokratis.

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif yang artinya atasan menolak segala bentuk persaingan dan atasan dapat bekerjasama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Kepemimpinan demokratis ialah kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah. Aktif dalam menggerakkan dan memotivasi (Rivai, 2010).

B. Gaya kepemimpinan Otoriter (otokratis).

Menurut Rivai (2010), kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Kepemimpinan otoriter ialah kepemimpinan yang memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan ditetapkan oleh pemimpin sendiri tanpa adanya diskusi maupun pertukaran pendapat dengan bawahan. Dalam kepemimpinan otoriter ini pemimpin sebagai pemikul tanggung jawab penuh atas keputusan yang telah diambilnya. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana atas keputusan yang telah ditetapkan pemimpin. Penerapan gaya kepemimpinan ini dapat menjadikan karyawan untuk lebih disiplin, dan tidak bergantung terhadap atasan kerja. Selain itu, pada gaya kepemimpinan ini keputusan dapat diambil secara cepat karena tidak melalui proses diskusi terlebih dahulu.

C. Gaya Kepemimpinan Bebas (*Laissez faire*) Gaya kepemimpinan bebas.

(*Laissez faire*) adalah cara seorang pimpinan dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan. Pada gaya kepemimpinan bebas ini pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada bawahannya sedangkan pemimpin sendiri hanya memainkan peranan kecil, pemimpin memfungsikan dirinya sebagai penasihat yang dilakukan dengan memberi kesempatan berkompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukan. Bawahan memiliki kebebasan penuh untuk proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang menurut karyawan paling sesuai dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Kepala desa harus memiliki skala prioritas dalam pembangunan desa. Pembangunan desa meliputi, sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan lumbung desa, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola desa yang demokratis.

3. METODE PENELITIAN

A. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan antara lain dengan cara:

- Menghubungi pihak desa, pendamping desa dan dinas kecamatan setempat untuk berkoordinasi mengenai, jadwal, dan hal-hal pendukung agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- Studi kepustakaan guna mempersiapkan materi atau masukan yang akan disampaikan beserta kesiapan para narasumber untuk mengisi kegiatan tersebut.
- Mempersiapkan bahan – bahan yang akan dipakai dalam penyampaian materi.

B. Metode pelaksanaan pada kegiatan ini dilakukan dengan metode antara lain:

- Diskusi
- Tanya Jawab

C. Waktu Pelaksanaan

Hari/tanggal : Sabtu, 11 September 2021

Waktu : 09.00 – 12.00 Wita

Ruang : Balai Desa Sungai Musang Kabupaten Banjar

1. HASIL

A. Hasil kegiatan yang dilakukan selama 1 hari tersebut antara lain:

- Para peserta memiliki pengetahuan tentang pengorganisasian aparatur desa melalui perencanaan kerja yang baik.
- Kepala Desa belajar untuk membuat rencana kerja dengan lebih terorganisir.
- Para peserta bisa memberikan masukan kepada kepala desa mengenai pembangunan desa.

4. Para peserta belajar menentukan skala prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
5. Terakhir, dengan diskusi dan Tanya jawab yang telah diadakan akan mampu menghasilkan rencana kerja yang optimal guna membangun desa dalam 5 tahun ke depan.

B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Kegiatan

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan sedangkan materi yang dibahas/didiskusikan cukup banyak.

Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada kegiatan Musrenbang.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dilakukan pada Kegiatan Musrenbang

5. KESIMPULAN

Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kepala desa sudah bisa menentukan pola kepemimpinan yang diterapkan di desa sungai musang. Para perangkat desa pun dapat memberikan masukan mengenai apa yang akan direncanakan kepala desa mengenai pembangunan desa. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan adapun saran yang dapat diajukan yaitu adanya kegiatan lanjutan yang bisa berupa kegiatan sejenis yang selalu diselenggarakan secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Reksohadiprodjo, Sukanto, Handoko, T.Hani. (2001). "Organisasi Perusahaan". Yogyakarta : BPFE
- [2]. Rivai. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3]. Rumegang, dkk, 2021, Efektivitas Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud, Jurnal Governance, Vol.1, No. 2, 2021, ISSN: 2088-2815
- [4]. Sulistiyo, Heru 2019, Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), Vol. 4, No. 2, November 2019: 75–82
- [5]. Thoha, Mifta, 2001. Perilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya. CV. Rajawali, Jakarta